

PENGELOLAAN OBJEK WISATA KEBUN STROBERI DI DESA BARUDUA KECAMATAN MALANGBONG

Danang Priyatmoko¹, Sirodjul Munir², Erlan Suwarlan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail: danangpriyatmoko10@gmail.com

Submitted: 10-11-2024, Reviewed: 15-11-2024, Published: 29-11-2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurang optimalnya Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Objek Wisata, Desa Barudua*

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi menciptakan pertumbuhan yang sangat progresif di negara berkembang khususnya di Indonesia. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya, bentang alam yang indah, dan lain sebagainya. Pengelolaan potensi wisata diharapkan mampu memberi dampak positif dengan adanya perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat sekitar objek wisata. Secara ekonomi pariwisata memberi dampak dalam perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja, seperti berdagang di tempat sekitar objek wisata dan menjadi pemandu wisata. Selain itu pengelolaan objek wisata juga bisa menjadi ladang pendapatan baru bagi desa yaitu sebagai pendapatan asli desa.

Pengelolaan dan pengembangan sektor objek wisata merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian, sosial, dan lingkungan dalam suatu negara. Berbagai potensi objek wisata yang dikembangkan adalah potensi wisata alam yang sebagian besar dimiliki oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia, hal tersebut dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian yang dapat menghasilkan devisa negara dengan cepat (quick yielding). Jika objek wisata

dipandang sebagai industri maka dari itu bahan bakunya juga tidak akan pernah habis, tidak seperti bahan baku wisata yang lain.

Pengelolaan dan pengembangan kawasan objek wisata di suatu daerah dapat dijadikan sebagai katalisator pembangunan sektor lain yang masih relevan dengan kepariwisataan, seperti: kamar untuk menginap (hotel), kuliner, perjalanan wisata (travel agent), dan industri kerajinan, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan perekonomian rakyat.

Dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata alam di Daerah Jawa Barat, khususnya di daerah Garut banyak objek wisata yang sangat menakjubkan untuk wisatawan salah satu yang dikembangkan adalah objek wisata Puncak Darajat. Puncak Darajat merupakan Gunung yang sangat indah juga dengan adanya kolam pemandian air panas yang di khususkan untuk wisatawan agar wisatawan tertarik untuk mengunjungi objek wisata Puncak Darajat yang terletak di Kabupaten Garut. Perkembangan Objek wisata Puncak Darajat merupakan tempat wisata yang baru jika dibanding tempat wisata lainnya di Kabupaten Garut. Di Puncak Darajat ini wisatawan dapat menikmati kuliner dengan melihat indahnya Kabupaten Garut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2013-2017 Pasal 3 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah, menjelaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2017, yang selanjutnya disebut RIPPARDA Tahun 2013-2017 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program-program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan, mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Sedangkan Pengelolaan potensi desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4 dalam peraturan desa huruf d bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Dalam menjalankan pemerintahannya yang merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut juga terdapat beberapa objek wisata yang cukup baik salah satunya objek wisata kebun Stroberi yang terletak di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Objek wisata Kebun Stroberi di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kepedulian untuk mengelola potensi pariwisata atau lokasi

daya tarik wisata di wilayah mereka agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan yang berkunjung, serta memiliki kesadaran akan manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan objek wisata kebun Stroberi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam pengelolaan dan pembangunan objek wisata perlu adanya sinergi baik dari pemerintah desa, pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat itu sendiri, sehingga objek wisata bisa mempunyai daya tarik tersendiri dan bisa menarik banyak wisatawan.

Pengelolaan objek wisata dalam suatu desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa) dengan pengelolaan yang menerapkan konsep ekoturisme yaitu pariwisata yang terletak di kawasan alam dan tetap menjaga kelestarian lingkungan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tetapi pada kenyataannya berdasarkan observasi awal diketahui bahwa pengelolaan objek wisata kebun Stroberi yang terletak di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut masih dikatakan belum optimal, dikarenakan kurangnya perhatian dari Pemerintah setempat dan kurangnya wawasan masyarakat untuk menarik perhatian dari para wisatawan. Sehingga banyaknya yang tidak tahu akan objek wisata Kebun Stroberi ini.

Adapun hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan indikator-indikator permasalahan yaitu antara lain :

1. Belum adanya struktur organisasi yang tetap di lingkungan Objek Wisata Kebun Stroberi di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya struktur organisasi pada objek wisata tersebut, dan pengelolaan objek wisata belum berjalan dengan baik.
2. Kurangnya Publikasi Objek Wisata Kebun Stroberi di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Hal itu dibuktikan dengan kurangnya pengetahuan pengelola Objek Wisata terhadap Media Sosial sehingga Pengelola Objek Wisata belum bisa melakukan publikasi di Media Sosial.
3. Kurangnya pengawasan dari Pemerintah Desa tentang pengelolaan objek wisata kepada wisatawan terkait dengan sampah di Objek Wisata Kebun Stroberi di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Hal itu dibuktikan dengan Objek Wisata Kebun Stroberi yang masih banyak sampah berserakan dimana-mana dikarenakan kurang nya tempat sampah.

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas di atas, maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi Di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut?

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut Atmosudirdjo (Saifuddin, 2014:53) mengemukakan bahwa, pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu perencanaan (Planning), diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu. Menurut Afifuddin (2010:3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan strategi.
2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab.
3. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi.
4. Pelaksanaan.

Menurut Lloyd & Aho (2020) terdapat empat fungsi utama dari pengelolaan, yaitu antara lain :

1. *Planing* (Perencanaan).

Menurut Braddon (dalam Pearce 1989:246) perencanaan pariwisata dilakukan untuk merencanakan kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta berbentuk rencana yang dapat di implementasikan.

Menurut Haryanto (2022:150-151) perencanaan pengembangan kawasan pariwisata adalah sesuatu perencanaan berbasis prakarsa pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya yang melibatkan masyarakat.

Adapun langkah-langkah yang di ambil dalam proses perencanaan kawasan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Perizinan dan Legalitas.
2. Survei Kawasan.
3. Analisis Kawasan.

2. *Organizing* (Pengorganisasian).

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata didukung oleh konsep pengorganisasian komunitas. Duthy & Bolo-Duthy (2003) menyebutkan tahapan dalam pengorganisasian komunitas yaitu : (1) Integration, (2) Social investigation or community study; (3) Issue identification and analysis; (4) Core group formation; (5) Ground work and community meeting; (6) Role playing; (7) Mobilization or action; (8) Evaluation and/or reflection; (9) Formalization of the community – based organization; (10) Phase out. Dari berbagai literatur yang telah disebutkan dapat disintesis tahapan pengorganisasian komunitas dalam pengembangan ekowisata. Tahapan tersebut adalah : (1) Tahapan Integrasi; (2) Pemetaan Isu, Pemasalahan, Dan Potensi Komunitas Terkait Ekowisata; (3) Merancang Tindakan-Tindakan Bersama Pengembangan Ekowisata; (4)

Implementasi Kegiatan Rancangan Pengembangan Ekowisata; (5) Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Ekowisata; (6) Refleksi Keberjalanan Pengembangan Ekowisata; (7) Feedback.

3. *Directing, Activating, Leading* (Mengarahkan, Menggerakkan, Memimpin).

Mengarahkan, menggerakkan, dan memimpin anggota-anggota organisasi atau staf agar bisa bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

4. *Controlling* (Mengendalikan).

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (2020) mengatakan bahwa agar potensi wisata alam menjadi berkembang perlu mengendalikan wisata tersebut dengan melakukan promosi melalui iklan Koran juga media sosial. Saat ini banyak objek wisata yang di iklankan oleh media sosial dikarenakan tempatnya sangat bagus. Juga pengendalian sampah sangat penting dalam mengendalikan objek wisata.

Menurut Harsoyo (1977:121) “pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “Kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu juga fungsi-fungsi manajemen menurut Pitana (2009:80) adalah sebagai berikut: Planning (perencanaan), Directing (mengarahkan), Organizing (termasuk koordinasi), dan Controlling (pengawasan).

Menurut Cox (Pitana, 2009:8182) pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: a) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan budaya dan keunikan lingkungan; b) Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata; c) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal; d) Pelayanan kepada wisatawan berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal; e) Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari berbagai penelitian di atas dapat dikatakan bahwa pengelolaan adalah suatu cara atau sebuah proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

2. Pengelolaan Objek Wisata

Dalam pengelolaan pariwisata ini, Undang-Undang Nomor 32 pasal 1 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat harus memperhatikan empat pertimbangan utama yaitu :

1. Aksesibilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keadaan.
2. Pelestarian lingkungan isu pokok manfaat dan siklus bisnis.
3. Kemajuan ekonomi isu pokok manfaat dan siklus bisnis.
4. Pengelolaan yang berkesinambungan isu pokok tujuan dan metode.

Di dalam menghadapi isu pokok pertimbangan utama dalam pengembangan pariwisata perlu dipersiapkan sebagai respon strategis antara lain: a. Jalur-jalur transportasi dan terminalnya. b. Keramah tamahan pelayanan. c. Penggarapan pelayanan. d. Penonjolan penyajian warisan budaya lokal. e. Siversifikasi dan pengendalian produk. f. Investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal. g. Kesertaan masyarakat dalam segala kegiatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, pengelolaan dan pengusaha objek dan daya tarik wisata alam meliputi 5 hal yaitu :

1. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan.
2. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam termasuk sarana dan prasarana yang ada.
3. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat dan sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusaha objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.
4. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek wisata dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.
5. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Dari berbagai penelitian diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan objek wisata adalah mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah melalui pariwisata yang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain.

3. Pengertian Pariwisata

Menurut Richardson dan Flicker (Pitana, 2009:45) bahwa 'Pariwisata merupakan suatu kegiatan bepergian orang-orang ke tempat-tempat di luar lingkungan biasa mereka dan bertinggal selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk liburan, kegiatan bisnis dan keperluan lainnya.' Sedangkan menurut Norval (Muljadi dan Warman, 2009:8-9) bahwa 'Pariwisata merupakan keseluruhan kegiatan yang

berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau luar suatu negara, kota atau wilayah tertentu.' Lebih lanjut Spillane (Hadiwijoyo, 2012:42) bahwa 'Pariwisata merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dan bersifat sementara, dilakukan perorangan ataupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan, keserasian dalam dimensi sosial budaya dan ilmu.'

Dari berbagai penelitian diatas dapat dikatakan bahwa parawisata adalah Rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia baik secara perorangan maupun berkelompok di dalam wilayah negara sendiri atau di negara lain dengan menggunakan jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan pemerintah, badan usaha dan masyarakat.

4. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013:2) desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.

Menurut Syafi'ie (2014:34-24) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran "an" menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.³⁰⁸ Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain,
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Menurut Kansil (2004:58) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari berbagai penelitian diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan (*Planning*)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi Di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam dimensi Perencanaan (*Planning*) secara keseluruhan belum dilaksanakan secara optimal, hal itu di buktikan dengan belum pahamnya baik itu Pemerintah Desa maupun Pengelola Objek Wisata Kebun Stroberi terkait dengan Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi Di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti bahwa Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi Di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam dimensi Pengorganisasian (*Organizing*) secara keseluruhan belum dilaksanakan secara optimal, hal itu di buktikan dengan minimnya pemahaman baik itu dari Pemerintah Desa maupun dari Pengelola Objek Wisata Kebun Stroberi terkait

dengan Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi Di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

3. Mengarahkan, Menggerakkan, Memimpin (*Directing, Activating, Leading*).

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti bahwa Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi Di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam dimensi Mengarahkan, Menggerakkan, Memimpin (*Directing, Activating, Leading*) secara keseluruhan belum dilaksanakan secara optimal, hal itu di buktikan dengan minimnya pemahaman baik itu dari Pemerintah Desa maupun dari Pengelola Objek Wisata Kebun Stroberi juga Kepala Desa belum mampu menciptakan inovasi-inovasi baru terkait dengan Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi Di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

4. Mengendalikan (*Controlling*)

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti bahwa Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi Di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, dalam dimensi Mengendalikan (*Controlling*) secara keseluruhan sudah dilaksanakan secara optimal, hal itu di buktikan dengan Kepala Desa sudah melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan kepada para pengelola Objek Wisata Kebun Stroberi yang ada di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi Di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut belum dilaksanakan secara optimal adapun yang menjadi hambatan dalam penelitian ini yaitu tentang Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi Di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut yang kurang pahamnya baik itu Pemerintah Desa juga Pengelola Objek Wisata dalam Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi Di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan keterbatasannya Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh pengelola Objek Wisata Kebun Stroberi yang ada di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, hal tersebut tentu menjadi hambatan dalam Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi Di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Hal inilah yang yang menjadi proses Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi Di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut berjalan tidak optimal.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi Di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut yaitu pemerintah Desa mengupayakan untuk memberikan pemahaman kepada Pengelola Objek Wisata agar meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dalam proses

Pengelolaan Objek Wisata Kebun Stroberi Di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabetta.
- A.J. Muljadi. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harsoyo, 1997. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Persada.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lloyd, R., & Aho, W. 2020. *The Four Function of Management: An Essential Guide to Management Principles*. Kansas: Digital Pressbooks.
- Pinata, I Gede dan Surya I Ketut. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Pratama, Aditya Bagus. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Media Press.
- Saifuddin. Anwar. 2014. *Buku Pedoman Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administratif Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Reflika Aditama.